

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi secara transparan dan bertanggung jawab.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran kritik dari instansi terkait sangat kami harapkan untuk perbaikan penyusunan LAKIP berikutnya.

Semoga LAKIP ini bermanfaat terutama bagi peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar di masa yang akan datang.

Benteng, 4 Februari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



**PATTA AMIR, S.P**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**NIP. 19641127 198711 1 003**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>EKSEKUTIF SUMMARY .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB. I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	11
C. GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA .....	13
D. ISU-ISU STRATEGIS .....	21
<b>BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>25</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	25
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	31
C. RENCANA KERJA TAHUNAN .....	38
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	55
<b>BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>59</b>
A. PENGUKURAN KINERJA .....	59
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	69
C. REALISASI KEUANGAN .....	92
<b>BAB. IV. PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	

## DAFTAR TABEL

TABEL. 2.1 .....	23
TABEL. 2.2 .....	29
TABEL. 2.3 .....	31
TABEL. 3.1 .....	90
TABEL. 3.2 .....	91
TABEL. 3.3 .....	91
TABEL. 3.4 .....	93

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

## EKSEKUTIF SUMMARY

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menetapkan visinya harus merujuk kepada visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 yakni **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MARITIM YANG SEJAHTERA BERBASIS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**.

Dengan memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma pemerintah seperti diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang pemerintah daerah, maka visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar adalah **“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR YANG AMANAH, PROFESIONAL DAN SEJAHTERA”**.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dalam peningkatan kinerja SDM Aparatur maka dirumuskan pula misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil sesuai kompetensinya;
2. Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, inovatif, dan kreatif;
3. Peningkatan kesejahteraan dan menerapkan reward and punishment;

4. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang mempunyai nilai spiritual dalam pelaksanaan tugas-tugas.

Dalam misi tersebut mengandung makna tugas dan sasaran yang ingin dicapai, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dijabarkan kedalam tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang yang dikuasainya/kompetensinya;
2. Meningkatnya kapasitas manajemen sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, dan kreatif;
3. Meningkatnya kesejahteraan dan penerapan Reward and Punishment terhadap Aparatur Sipil Negara;
4. Meningkatnya kesadaran, iman, dan takwa sumber daya manusia dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Untuk mencapai tujuan maka ditetapkan pula sasaran sebagai arah dan tolak ukur yang harus dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas profesionalisme dalam perencanaan kepegawaian;
2. Tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang siap pakai;
3. Meningkatnya kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Meningkatnya perilaku peduli terhadap tata pemerintahan yang baik;
5. Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Manusia;
6. Meningkatnya penyebaran dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi;

7. Terpenuhinya penempatan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai keahliannya;
8. Terwujudnya peningkatan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;
9. Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum bidang disiplin;
10. Terwujudnya penghargaan dan kesejahteraan pegawai.

Mengacu pada visi dan misi, maka tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pencapaiannya dihadapkan oleh berbagai kendala yang bisa menghambat tercapainya tujuan yang diharapkan. Kendala-kendalanya sebagai berikut :

1. Terbatasnya kemampuan SDM Aparatur;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;
3. Belum tersedianya data base.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, merupakan faktor yang dapat menghambat pencapaian kinerja instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengatasi kendala tersebut dengan cara sebagai berikut :

1. Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sampai penempatannya harus disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dimiliki;
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai;
3. Melakukan pelatihan-pelatihan teknis dan fungsional untuk peningkatan kompetensi aparatur.

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik ( Good Governance) maka perlu dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggaranya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan akan nilai-nilai ideal tersebut tentu akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi misi dan tujuan organisasi, serta secara umum mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara dalam konsep nawa cita yang menjadi arah dan kebijakan pembangunan nasional.

Pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) aspek yaitu meliputi Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan Fisik yaitu pembangunan pada aspek berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, sedang pembangunan non fisik yaitu pembangunan pada aspek berkaitan

dengan sumber daya manusia, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar melaporkan hasil kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah di bidang kepegawaian selama tahun anggaran 2022.

Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil capaian pelaksanaan kinerja akan menjadi masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya yang telah dilaksanakan. Karena itu, penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LAKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan

sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 ini berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  11. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025  
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat

Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);

33. Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 692);
34. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 731);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 635);
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Tahun 2016-2021.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan selama 1 (satu) tahun. Dalam pembuatan

LAKIP, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan maksud :

1. Mengarahkan seluruh dimensi dan potensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan cara mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia Aparatur dengan Sumber Daya lainnya, agar mampu memenuhi keinginan Stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik baik nasional maupun global;
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja organisasi perangkat daerah (renja OPD).

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Mengantisipasi dan beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik;
2. Sinkronisasi antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

## **C. GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar.

Susunan organisasi serta tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

#### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada Pemerintah Daerah dan fungsi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan fungsi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;

- d. Pengekoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

❖ **Kepala Subbagian Program**

Tugas Kepala Subbagian Program adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

❖ **Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian dan Perundang-undangan.

❖ **Kepala Subbagian Keuangan**

Tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

**3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**

Tugas Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan

teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan fungsi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan**

Tugas Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan dan fungsi Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur**

Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur dan fungsi Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi aparatur;

- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten kepulauan selayar adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :

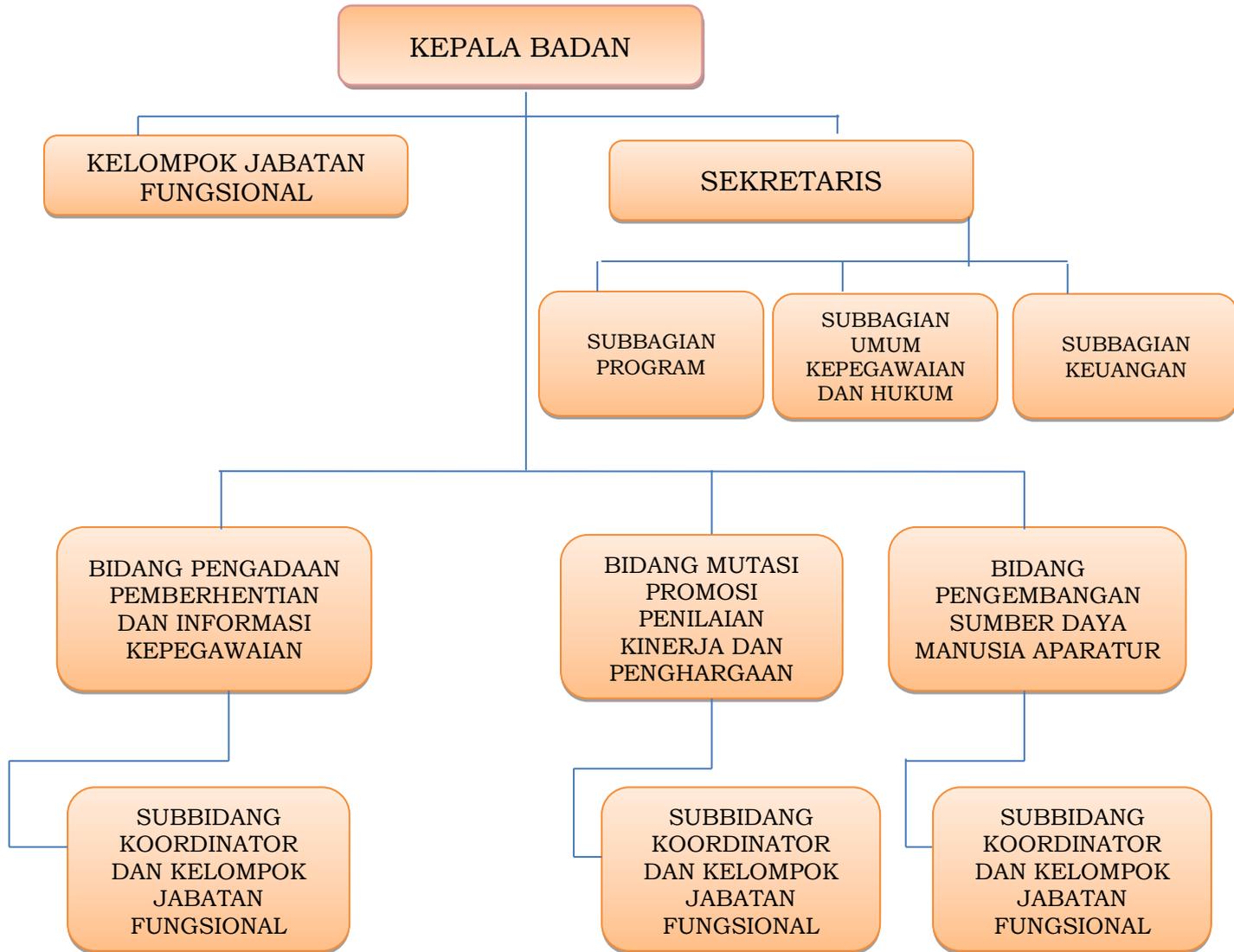
d. Bidang Mutasi Promosi Penilaian Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar berikut :

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



#### **D. ISU – ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah pernyataan mengenai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan memperhatikan berbagai regulasi atau perangkat aturan serta adanya perkembangan dan terjadinya perubahan lingkungan strategis selama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir, maka di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2016-2021, ada beberapa permasalahan dan isu-isu yang sangat mendasar untuk dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk mendukung agenda utama pembangunan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang yaitu:

- a. Belum Optimalnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- b. Belum sesuainya kompetensi pegawai dengan kebutuhan riil;
- c. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
- d. Masih lemahnya pelaksanaan dan penegakan hukum dan perundang-undangan;
- e. Masih perlunya penataan struktur dan budaya organisasi/ kelembagaan instansi pemerintah dalam mendukung pemerintahan yang responsif;
- f. Masih kurangnya reward and punishment dalam rangka peningkatan motivasi aparatur;
- g. Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

**Tabel 2.1**  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Badan  
 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten  
 Kepulauan Selayar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program  
 Bupati Kepulauan Selayar

<b>Visi: “Terwujudnya Masyarakat Maritim Yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Budaya”</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD BKPSDM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif,partisipatif dan transparan	1. Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada PNS 2. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur 3. Terhambatnya penyampaian Informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi OPD yang tersebar 4. Kurangnya Pemahaman Aparatur terhadap peraturan perundang – undangan kepegawaian	1. Kurangnya keordinasi antar Stekholder 2. Masih terbatasnya SDM BKPSDM baik secara kuantitas maupun secara kualitas 3. Kurangnya sarana dan prasarana 4. Jarak tempuh antara Badan Kepegawaian dengan stekholder /dinas	1. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 2. Terpenuhinya anggaran pada kegiatan kegiatan prioritas Pada BKSDM

		<p>5. Era globalisasi dan Kemajuan IPTEK menuntut perkembangan system pelayanan kepegawaian harus mengikuti Perubahan</p> <p>6. Adanya PNS yang terlibat masalah Hukum</p> <p>7. Tingkat ketidakhadiran relative masih tinggi</p> <p>8. Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN</p>		<p>3. Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur pada BKPSDM.</p>
--	--	--	--	---

## **BAB II**

### **P E R E N C A N A A N   D A N   P E R J A N J I A N   K I N E R J A**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah kabupaten kepulauan Selayar, sehingga rencana-rencana yang disusun dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Maritim Yang Sejahtera  
Berbasis Nilai Keagamaan dan Budaya”**

Dalam rumusan visi ini terdapat 3 (tiga) pokok visi yakni “masyarakat maritim sejahtera”, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural”. “Masyarakat maritim yang sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “Nilai Agama” dan “Nilai Budaya” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

“**Masyarakat maritim yang sejahtera**” mengandung dua pengertian kondisi, yakni masyarakat Selayar sebagai masyarakat maritim dan masyarakat Selayar sebagai masyarakat yang sejahtera. Dalam pokok visi ini tercakup berbagai fokus terkait kesejahteraan masyarakat dilihat dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada

berbagai sektor serta kesejahteraan sosial, keterpenuhan berbagai infrastruktur wilayah, hasil-hasil pengelolaan sumberdaya alam yang unggul, serta produktivitas dan daya saing daerah.

**“Berbasis Nilai Keagamaan”** mengandung pengertian bahwa masyarakat Selayar dalam lima tahun kedepan akan semakin mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas dan rukun serta menempatkan nilai agama sebagai sumber inspirasi dan motivasi serta basis nilai utama dalam kehidupan.

**“Berbasis Nilai Budaya”** mengandung pengertian bahwa dalam lima tahun kedepan kebudayaan daerah akan semakin berkembang dalam merespon dinamika kebudayaan nasional dan global. Dalam pokok visi ini tradisi dan kearifan lokal ditempatkan sebagai unsur yang akan terlestarikan secara dinamis.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2016-2021 adalah:

1. Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi Dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh dan Berkelanjutan;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat;

4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata;
5. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam sesuai Keunggulan Komperatif dan Kompetitif Daerah;
6. Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan;
7. Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan.

Untuk terwujudnya visi pembangunan daerah maka tujuan pembangunan daerah yang hendak dicapai pada 2016-2021 adalah:

1. Memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi serta nilai utama dalam penyelenggaraan pembangunan;
2. Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kesadaran hukum;
4. Sinkronisasi dan integrasi kebijakan di bidang transmigrasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Meningkatkan kualitas pemerintahan desa;
6. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;

7. Meningkatkan peran pemuda dan membudayakan olahraga;
8. Meningkatkan kemampuan membuka isolasi daerah;
9. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar;
10. Merevitalisasi kawasan dan obyek wisata;
11. Meningkatkan keterintegrasian wilayah daratan dan pulau-pulau;
12. Meningkatkan daya saing dan investasi daerah;
13. Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis Wilayah dalam rangka optimisasi pemanfaatan Sumberdaya Kemaritiman;
14. Memelihara fungsi lingkungan hidup;
15. Meningkatkan keberdayaan tenaga kerja;
16. Meningkatkan keberdayaan usaha ekonomi kerakyatan;
17. Memantapkan jati diri keselayaran.

Merujuk pada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan (2016 – 2021), maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 – 2021, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

<b>VISI</b> : Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Budaya			
<b>MISI 2</b> : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	1.1. Meningkatkan kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)	1. Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor	1.1. Penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah  1.2. Peningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah
		2. Meningkatkan kualitas manajemen Aparatur Pemerintah Daerah termasuk didalamnya penerapan punishment dan reward	2.1. Penerapan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit sistem
	1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (S-4)	1. Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Perbaikan dan penerapan sistem dan prosedur pelayanan publik

Dengan memperhatikan Visi Daerah serta dengan memperhatikan perubahan Paradigma Pemerintahan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar adalah gambaran kondisi objektif yang ingin dicapai dimasa kini dan masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategik dengan indikator yang jelas dan mempunyai tolak ukur (*Benchmark*) serta tugas yang fleksibel (*Moving Target*). Berdasarkan pengertian ini maka Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu : *"TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR YANG AMANAH, PROFESIONAL DAN SEJAHTERA"*.

Dan untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan karir pegawai negeri sipil sesuai kompetensinya;
2. Menciptakan sumber daya aparatur yang berkualitas, inovatif, dan kreatif;
3. Peningkatan kesejahteraan dan menerapkan reward and punishment;
4. Tersedianya sumber daya aparatur yang mempunyai nilai spiritual dalam pelaksanaan tugas-tugas.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel. 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SASARAN	IKU	RUMUSAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKU : I Cakupan Ketersediaan dan pemerataan Pegawai (PNS) berdasarkan Analisis Kebutuhan Pegawai	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>  Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN  Sub. Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2000 formasi	364 formasi	18,2 %	Hasil evaluasi pengadaan ASN disusun dalam bentuk 1 laporan.

		2. Evaluasi Pengadaan ASN Dan Pengadaan ASN	364 orang	364 orang	100 %	
	IKU : II Cakupan Tingkat Kedisiplinan dan pemberian Reward dan Panisment	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>  Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  Sub. Kegiatan : 1. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	8 orang	6 orang	75 %	Pada tahun 2022, sebanyak 6 orang ASN yang mendapatkan penghargaan, yaitu: a. 3 orang yang mendapatkan penghargaan sebagai pegawai berprestasi; b. 3 orang ASN yang mendapatkan penghargaan pengabdian.
		2. Pembinaan Disiplin ASN	35 orang	125 orang	100 %	Pada tahun 2022, terdapat 125 orang ASN yang telah mendapatkan sanksi dan pembinaan

						<p>disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan yang terdiri dari :</p> <p>a. 123 orang dengan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN; Data tersebut telah melebihi dari target yang telah ditentukan.</p> <p>b. 2 Orang dengan jenis pelanggaran Tindak Pidana Korupsi;</p>
		3. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	200 orang	260 orang	100 %	<p>Pada tahun 2022 jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya telah melebihi target yang ditentukan yakni sebanyak 260 orang yang terdiri dari:</p> <p>a. Penerima</p>

						<p>Satya Lencana Karya Satya untuk X (Sepuluh) tahun sebanyak 185 orang;</p> <p>b. Penerima Satya Lencana Karya Satya untuk XX (Dua Puluh) tahun sebanyak 34 Orang;</p> <p>c. Penerima Satya Lencana Karya Satya untuk XXX (Tiga Puluh) tahun sebanyak 41 orang.</p>
2.1. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);	<b>IKU :III</b> Cakupan /Jumlah Pejabat yang telah mengikuti diklat aparatur sesuai jenjang jabatan	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>  Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional  Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan				

		Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
		1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);	0 Orang	0 Orang	0 %	<p>Pada tahun 2022, Realisasi kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) adalah melebihi target yaitu sebanyak 15 orang dari 12 orang peserta yang ditargetkan.</p> <p>Pada tahun 2022, jumlah CPNS yang mengikuti Latsar sejumlah 82 orang sesuai dengan jumlah peserta yang lulus seleksi CPNS tahun 2021. Hal ini tidak sesuai dengan target awal 91 orang sehingga dikatakan hanya terealisasi 90 %.</p>
		2. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN);	3 orang	2 Orang	67 %	
		3. Pelatihan Kepemimpinan administrator (PKA);	12 Orang	15 Orang	100 %	
		4. Pelatihan Dasar CPNS	91 orang	82 orang	90 %	

		<p><b>Program Kepegawaian Daerah</b></p> <p>Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN</p> <p>Sub. Kegiatan: 1. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat;</p> <p>2. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional</p>	<p>1 kali</p> <p>40 orang</p>	<p>1 kali</p> <p>80 orang</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>Pada tahun 2022, realisasi kegiatan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat jabatan fungsional adalah melebihi target yaitu sebanyak 80 orang dari 40 orang peserta yang ditargetkan.</p>
2.2. Rasio pegawai fungsional (%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<p><b>IKU : IV</b> Cakupan Ketersediaan ASN yang Kompeten berdasarkan tingkat kesesuaian penempatan dengan kompetensi pegawai</p>	<p><b>Program Kepegawaian Daerah</b></p> <p>Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN</p> <p>Sub. Kegiatan : 1. Pengelolaan Mutasi ASN</p>	<p>676 Orang</p>	<p>550 Orang</p>	<p>81,4 %</p>	<p>Pengelolaan Mutasi dan ASN pada tahun 2022 dapat terselesaikan sebanyak 81,4 % yaitu 550 orang dari 676 orang yang menjadi target awal. Dengan perincian sebagai</p>

		<p>2. Pengelolaan Promosi ASN</p> <p><b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b></p> <p>Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</p> <p>Sub. Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan</p>	1 kali	2 kali	100 %	<p>berikut :</p> <p>a. Jumlah ASN yang dimutasi sebanyak orang;</p> <p>b. Jumlah ASN yang di rotasi sebanyak orang;</p> <p>c. Jumlah ASN yang mendapat promosi sebanyak orang.</p> <p>Penyelenggaraan seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama pada tahun 2022 dilakukan sebanyak 2 kali dengan total jumlah peserta 21 orang</p>
--	--	--	--------	--------	-------	--

		Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				
		1. Terselenggaranya Pemetaan dan Evaluasi Kompetensi Jabatan Administrator	141 orang	131 orang	93 %	Pada tahun 2022 telah diselenggarakan pemetaan dan evaluasi kompetensi jabatan administrator dengan realisasi yang terdiri dari : a. Jabatan Administrator sebanyak 131 orang (93 %) b. Jabatan Tinggi Pratama (JPT) sebanyak 31 OPD (100 %).
		2. Terselenggaranya Pemetaan dan Evaluasi Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	31 OPD	31 OPD	100 %	

### C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis, maka disusun rencana kerja yang merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun. Pelaksanaan target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang dilihat pada setiap kinerja, yang juga merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan disetiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kerja Tahun 2022 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan administrasi Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah rencana kerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								7.780.131.571				
5					KEPEGAWAIAN								6.028.131.571				
5					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.803.131.571				
5					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								39.000.000				
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	RENJA, RENSTRA, SOP	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100%	16.625.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	17.000.000
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	RKA	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	3.040.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	3.500.000
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	RKA Perubahan	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	3.500.000
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	DPA	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	2.950.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	3.000.000

5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	DPA Perubahan	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	4.000.000
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	LPPD LKPJ EKPD	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	-	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	3.000.000
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	4.997.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	5.000.000
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>3.305.317.000</b>				<b>3.777.500.000</b>	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Jumlah PNS yang menerima gaji, tunjangan PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan dan ketersediaan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	42 orang	100%	3.229.706.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	3.700.000.000

5	03	01	2.02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Lancarnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan dan ketersediaan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	46.261.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	47.000.000
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelaporan keuangan/akuntansi SKPD	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan dan ketersediaan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	12.950.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	13.000.000
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan dan ketersediaan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	3.500.000
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	RFK	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan dan ketersediaan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	13.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	14.000.000

5	03	01	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							<b>11.109.000</b>				<b>121.131.571</b>		
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Laporan Hasil Pengelolaan dan Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	11.109.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	121.131.571
5	03	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>19.768.000</b>				<b>21.000.000</b>		
5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNSD	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	16.029.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	17.000.000
5	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Data Kinerja ASN	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3675 Data	100%	3.739.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	4.000.000
5	03	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>494.558.000</b>				<b>500.500.000</b>		
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor yang tersedia	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	62 unit	100%	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	11.000.000

5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 unit	100%	9.710.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	10.000.000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	tersedianya bahan cetak dan penandaan	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	21.000.000
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 media cetak	100%	14.720.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	15.000.000
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Jumlah bahan/material yang tersedia	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	31.450.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	32.000.000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	terselenggaranya perjalanan dinas	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	100%	352.678.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhiya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	354.000.000

5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Jumlah Arsip dan Tata Naskah Kepegawaian yang tersedia	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	16.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	16.500.000
5	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Absensi Online	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3675 orang	100%	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	41.000.000
5	03	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>50.000.000</b>			<b>70.000.000</b>	
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Tersedianya Kendaraan Dinas untuk Kelancaran Tugas-tugas Kedinasan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	-	-	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	50.000.000
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	jumlah mebeleur kantor yang tersedia	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	-	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	20.000.000
5	03	01	2.07	08	Pengadaan Aset tak berwujud	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Tersedianya Mebeleur Kantor Untuk Kelancaran tugas-tugas Kedinasan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	27 unit	100%	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	-

5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							117.154.200					120.000.000		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	terlaksananya administrasi surat menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	20.082.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	21.000.000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	82.775.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	83.000.000
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 unit	100%	10.150.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	11.000.000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	4.147.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	5.000.000

5	03	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>153.461.000</b>					<b>154.000.000</b>	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar pajaknya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	26 Unit	100%	103.510.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	104.000.000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	Kondisi Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Bangunan	100%	49.951.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran	100%	50.000.000
5	03	02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>							<b>1.180.868.000</b>					<b>1.225.000.000</b>		
5	03	02	2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>							<b>384.878.000</b>					<b>418.500.000</b>	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Formasi Pengadaan ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2000 formasi	100%	16.490.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	17.000.000

5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	jumlah pengurusan dan penerbitan KARIS-KARSU Kartu Pegawai Kartu Peserta Taspen (KPT) SK PNS SK CPNS	Persentase Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	200 Kartu 200 Kartu 150 Kartu 250SK 150SK	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	16.000.000
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	- jumlah ASN yang terpenuhi - jumlah poran hasil evaluasi pengadaan ASN yang tersusun	Persentase Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan 364 orang	100%	240.262.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	272.000.000
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah PNS yang memasuki masa Pensiun	Persentase Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100 orang	100%	19.338.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	19.500.000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	terlaksana-nya pelaksanaan HUT KORPRI	Persentase Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Kali	100%	25.258.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	25.000.000

5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Data Pegawai PNSD dalam aplikasi (SAPK) yang terkelola	Persentase Pengadaan , Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3675 Data	100%	19.736.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	20.000.000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	persentase data pegawai dalam aplikasi SIMPEG yang terpelihara/ terkelola	Persentase Pengadaan , Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3675 Data	100%	31.832.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	32.000.000
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian yang tersusun	Persentase Pengadaan , Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	16.962.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	17.000.000
5	03	02	2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>							<b>395.128.000</b>				<b>400.000.000</b>	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah ASN yang dimutasi, rotasi dan promosi	Persentase mutasi dan promosi ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	676 orang	100%	58.466.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	59.000.000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Terselenggaranya ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat	Persentase mutasi dan promosi ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	700 orang	100%	106.479.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	110.000.000

5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	- Jumlah Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terselenggara - Jumlah Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah yang terselenggara	Persentase mutasi dan promosi ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 kali 1 kali	100%	230.183.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	231.000.000
5	03	02	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>							<b>275.780.600</b>				<b>278.000.000</b>	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah SN yang mendapatkan kenaikan ji berkala (KGB)	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	600 SK	100%	13.236.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	14.000.000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	- Persentase SK Tugas belajar, surat izin beajar dan surat keterangan peningkatan pendidikan yang diterbitkan - Jumlah ASN yang menerima Bantuan Tugas Belajar dan Penyelesaian Pendidikan	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 orang	100%	137.886.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	138.000.000

5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Terselenggaranya pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/workshop PNS	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 kali	100%	114.658.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	115.000.000
5	03	02	2.03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	- Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknisfungsional dn bimtek khusus ASN - Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi jabatan fungsional	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40 Orang 10 Orang	100%	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	11.000.000
5	03	02	2.04		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>							<b>125.081.400</b>				<b>128.500.000</b>	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yng tersusun	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3675 orang	100%	13.587.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	14.000.000

5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah ASN berprestasi yang diberi penghargaan	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	8 orang	100%	38.275.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	40.000.000
5	03	02	2.04	05	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	200 orang	100%	31.270.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	31.500.000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah ASN mendapatkan pembinaan	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	35 orang	100%	20.884.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	21.500.000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin yang dikelola/ditindaklanjuti	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	35 orang	100%	21.063.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	21.500.000

5	04				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>													<b>1.443.180.000</b>						<b>1.752.000.000</b>
5	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>													<b>1.443.180.000</b>						<b>1.752.000.000</b>
5	04	02	2.01		<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>													<b>249.850.000</b>						<b>251.000.000</b>
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	- Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis fungsional dan Bimtek khusus '-Terseleenggaranya Diklat Teknis dan Bimtek Khusus	Pelaksanaan Diklat Teknis dan Bimtek Khusus	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	60 orang	100%	246.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Diklat Yeknis dan Bimtek Khusus	100%							247.000.000
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	- Jumlah OPD yang mengikuti mengikuti pembinaan peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui ASN Corporate University '- Peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pendekatan ASN Corporate University	Pembinaan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur melalui ASN Corporate University	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	31 OPD	100%	3.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pembinaan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur melalui ASN Corporate University	100%							4.000.000
5	04	02	2.02		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>													<b>1.193.330.000</b>						<b>1.501.000.000</b>

5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP)	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0 orang	100%	1.193.330.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (KPK)	100%	1.501.000.000
							Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dasar CPNS	Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	91 Orang	100%		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS	100%	
							Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)	Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Orang	100%		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)	100%	
							Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Orang	100%		-	Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	100%	

#### **D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar berisikan penugasan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perjanjian kinerja memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 ini telah selaras dengan rencana kerja tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Secara keseluruhan isi Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebagai berikut,

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	1. Indeks kepuasan layanan 2. Persentase pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Nilai SAKIP OPD 4. Pelaksanaan administrasi perkantoran 5. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 6. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan 7. Jumlah fasilitasi organisasi profesi ASN 8. Laporan data kepegawaian yang up to date dan terintegrasi 9. Persentase penetapan SK pensiun tepat waktu 10. Jumlah SK kenaikan pangkat 11. Jumlah SK jabatan fungsional 12. Jumlah pelaksana yang dipromosi ke abatan pengawas/JFT Muda	85 % 89,21 % B (65) 4 Laporan 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Organisasi Profesi Sesuai 100 % 500 SK 200 SK 75 Orang

		13. Jumlah pejabat pengawas yang dipromosi ke abatan dministrator/JFT Madya	50 Orang
		14. Jumlah pejabat administrator yang dipromosi ke jabatan JFT Pratama	5 Orang
		15. Pengelolaan data kinerja ASN	3800 Data
		16. Jumlah ASN yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	600 SK
		17. Jumlah penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	1 Laporan
		18. Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya	200 orang
		19. Pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi	9 orang
		20. Jumlah pengelolaan peanggaran disiplin SN	10 orang
		21. Jumlah ASN yang diberikan pembinaan kedisiplinan	50 orang
2.	Meningkatnya nilai SAKIP	1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja	20 16 11 8 10
3.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan set daerah	1. Laporan keuangan OPD sesuai SAP 2. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 3. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 4. Jumlah verifikasi keuangan SKPD 5. Jumlah penyusunan dokumen laporan keuangan pertriwulan 6. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan 7. Jumlah pelaporan dan	Sesuai 45 orang 12 bulan 12000 lembar 4 laporan 3 dokumen 12 laporan

		analisis prognosis realisasi anggaran	
4.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar	1. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan SDM melalui peningkatan pendidikan lanjutan 2. Persentase cakupan ASN yang lulus diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat sosio-kultural dan diklat teknis 3. Jumlah Pejabat JPT dan Pejabat Administrasi yang mengikuti diklat kepemimpinan yang sesuai kualifikasi	6 orang  80,24 %  50 orang

Secara lebih rinci maka Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sesuai dengan tingkat jabatan dan tanggungjawab dijabarkan sebagai berikut :

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan yang ingin dicapai perangkat daerah dalam rangka perwujudan good governance dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu :

- Perencanaan Stratejik
- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Dan Pelaporan Kinerja

#### **A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran Kinerja Kegiatan merupakan sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat digambarkan pada pengukuran kinerja.

### CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

**NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)**

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
Terpenuhinya Kebutuhan dan tingkat kompetensi SDM dalam menjalankan tugas	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	25 Jenis Layanan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) yang tersusun; Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang tersusun; Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersusun.	Dokumen	3	100 %  Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun adalah 3 dokumen yakni Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Dokumen	1	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan yang tersusun	Dokumen	1	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	Dokumen	1	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan yang tersusun	Dokumen	1	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan, Penganggaran, dan	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Akuntabilitas	Dokumen	1	100 %

			an Daerah Kabupaten/ Kota	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Daerah	Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang tersusun			
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Orang	42	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran yang terselenggara	Persen (%)	100	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya pelaporan keuangan/ akuntansi SKPD	Laporan	12	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Laporan	1	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan realisasi fisik kegiatan (RFK) bulanan yang tersusun	Laporan	12	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pengelolaan dan penataan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	Laporan	1	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Unit	62	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	unit	2	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	Bulan	12	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Media Cetak	4	100%

			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan bahan/material	Jumlah bahan material yang tersedia	Bulan	12	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Perjalanan Dinas	Bulan	12	100%
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pengadaan Aset tak berwujud	Tersedianya mebeleur kantor untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan	unit	27	100%
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	Bulan	12	100%
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	100%
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	unit	2	100%
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peyanan umum kantor	Bulan	12	100%
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya	Unit	26	100%
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung perkantoran dalam kondisi baik yang terpelihara	Bangunan	1	100 %
	Persentase CPNSD yang telah bersyarat mengikuti Diklat Prajabatan		Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan dasar CPNS;	Orang	91	90 %  Peserta yang mengikuti pelatihan dsar CPNS adalah sebanyak 82 orang, hal ini sesuai

					Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				dengan jumlah peserta seleksi CPNS yang lulus dan berhak mengikuti Latsar, namun tidak sesuai dengan target awal
	Persentase jabatan struktural yang terisi		Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama yang terselenggara	Kali	1	100 % Penyelenggaraan seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan sebanyak 2 kali dengan total jumlah peserta 21 orang
	Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat Aparatur sesuai jenjang jabatan		Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	- Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP); - Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN); - Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA);	Orang  Orang  Orang	0  3  12	84 % - Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) sebanyak 2 orang (terrealisasi 67 %), - Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 15 orang (terrealisasi 100 %),
	Persentase ketersediaan formasi dan bezetting	3 Jenis Layanan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNSD Kabupaten Kepulauan Selayar	Dokumen	1	100 %
			Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah formasi pengadaan ASN	Formasi	2000	18,2 % Dari 2000 formasi yang telah disusun dalam rangka pengadaan ASN, hanya dapat terpenuhi sebanyak 364 formasi

			Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	- jumlah ASN yang terpenuhi; - Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN yang tersusun	Laporan orang	1 364	100 % Hasil evaluasi pengadaan ASN sebanyak 364 formasi disusun dalam 1 laporan
	- Persentase Kesesuaian latar belakang Pendidikan/ Pengalaman kerja/diklat yang pernah diikuti dengan Jabatan struktural yang diduduki		Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi, rotasi dan promosi	Orang	676	81,4 % Pengelolaan Mutasi dan ASN pada tahun 2022 dapat terselesaikan/terrealisasi sebanyak 550 orang dari 676 orang yang menjadi target awal. Dengan perincian sebagai berikut : - Jumlah ASN yang dimutasi sebanyak 278 orang; - Jumlah ASN yang di rotasi Sebanyak 134 orang; - Jumlah ASN yang Mendapat promosi sebanyak 138 orang.
	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Data kinerja ASN yang dikelola	Data	3675	94 % Data kinerja ASN yang telah dikelola dan dilaporkan adalah sebesar 3454 data.
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dan tata naskah kepegawaian yang tersedia	Dokumen	1	100 %
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Absensi Online ASN yang terselenggara	Orang	3675	100 % Data absensi online yang dapat terkelola adalah sebanyak 3.695 orang
			Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Pengurusan dan penerbitan KARIS/ KARSU bagi PNS	Kartu	200	90 % - Dari 200 KARIS/ KARSU yang ditargetkan, dapat terealisasi sebanyak 150 kartu

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pengurusan dan penerbitan Kartu Pegawai bagi PNS;</li> <li>- Jumlah pengurusan dan penerbitan Kartu Peserta Taspen (KPT);</li> <li>- Jumlah pengurusan dan penerbitan SK PNS;</li> <li>- Jumlah pengurusan dan penerbitan SK CPNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kartu</li> <li>Kartu</li> <li>SK</li> <li>SK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>200</li> <li>150</li> <li>250</li> <li>91</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada lagi penerbitan Kartu pegawai karena telah diganti menjadi Kartu ASN Virtual.</li> <li>- Kartu peserta taspen (KPT) dapat terealisasi</li> <li>- Tidak ada penerbitan dan pengurusan SK PNS karena tidak adanya seleksi CPNS pada tahun 2020.</li> <li>- Penerbitan SK CPNS dapat terealisasi 90 % yaitu sebanyak 82 SK dari 91 SK yang Ditargetkan pada awal perencanaan. 82 SK CPNS yang terbit sesuai dengan jumlah CPNS yang ulus seleksi pada tahun 2021.</li> </ul>
			Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun	Orang	100	100 % Jumlah PNS Yang pensiun pada tahun 2022 sebanyak 138 orang yang terdiri dari : - BUP : 120 orang; - MD : 14 Orang; - APS : 4 orang
			Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Hut Korpri yang terselenggara	Kali	1	100 %
			Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data PNSD dalam Aplikasi SAPK yang tersedia	Data	3675	100 % Data PNSD dalam Aplikasi SAPK

									sebanyak 3695 data
			Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan data kepegawaian	Data Pegawai dalam Aplikasi SIMPEG yang tersedia/terkelola	Data	3675	100 % Data PNSD dalam Aplikasi SIMPEG sebanyak 3695 data
			Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Kepegawaian	Jumlah laporan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Kepegawaian yang tersusun	Laporan	1	100 %
			Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terselenggaranya ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat	Orang	700	100 % Jumlah ASN yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat adalah 848 orang pada periode April dan Oktober, dengan rincian : - Periode April sebanyak 428 orang - Periode Oktober Sebanyak 420 orang
			Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	SK	600	81,2 % Jumlah ASN yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala dapat terpenuhi sebesar 487 orang atau 487 SK KGB, dari 600 SK KB yang ditargetkan.
			Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah ASN yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Orang	200	100 % Jumlah ASN yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada tahun 2022 adalah sebanyak 260 orang yang terdiri atas : - satya lencana karya satya X tahun Sebanyak 185 orang, - satya lencana

									karya satya XX tahun sebanyak 34 orang, dan karya satya lencana karya satya XXX sebanyak 41 orang.
	Persentase peserta penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	1 Jenis Layanan	Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	- Jumlah ASN yang menerima bantuan tugas belajar dan penyelesaian Pendidikan. - Persentase SK tugas belajar, surat izin belajar, dan surat keterangan peningkatan pendidikan yang diterbitkan.	Orang	10	70 %  Pada tahun 2022, hanya dapat terealisasi sebanyak 7 orang dari 10 orang yang ditargetkan, denn rincian : - 2 orang Yang Menerima bantuan tugas belajar - 5 orang yang Menerima izin belajar
	Jumlah Aparatur yang mendapatkan penghargaan	1 Jenis Layanan	Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang berprestasi yang diberi penghargaan	Orang	8	75 %  Dari 8 orang yang telah ditargetkan mendapatkan penghargaan, dapat terealisasi sebanyak 6 orang yaitu 3 orang mendapatkan penghargaan berprestasi dan 3 orang mendapatkan penghargaan pengabdian.
	Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin pegawai - kehadiran - pelanggaran lain	1 Jenis Layanan	Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan	Orang	35	100 % Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dan telah mendapatkan pembinaan disiplin adalah 125 orang yang terdiri dari : - 123 orang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN, - 2 orang melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi

			Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Penyelenggaraan Disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin yang dikelola/ ditindaklanjuti	Orang	35	100 % Jumlah pelanggaran disiplin yang telah dikelola/ ditindaklanjuti adalah 125 orang
	- Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan pelatihan		Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terselenggaranya pelatihan/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ workshop PNS	kali	1	100 %
	- Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal		Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	- Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis/fungsional dan bimtek khusus ASN;	Orang	40	100 %
	- Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural.		Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengekoordinasian, fasilitasi, pemantauan , evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui ASN Corporate University	OPD	31	0 % tidak terlaksana karena terjadi pergeseran anggaran perubahan tahap kedua
	- Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah;		Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	- Terselenggaranya Pemetaan dan Evaluasi Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	31	100 %

<p>- Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah (Eselon III);</p> <p>- Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.</p>		<p>Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>	<p>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</p>	<p>Penyusunan Kebijakan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Terselenggaranya Pemetaan dan Evaluasi Kompetensi Jabatan Administrator;</p>	<p>Orang</p>	<p>141</p>	<p>93 % yaitu dari 141 orang peserta yang ditargetkan dapat terealisasi sebanyak 131 orang</p>
--	--	---	--	--	---	--------------	------------	--

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Capaian Kinerja Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

### a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan setiap kegiatan terdiri dari satu atau beberapa sub kegiatan. Indikator capaian dalam program ini ada dua yaitu persentase capaian kinerja dengan target kinerja 100 % dan persentase capaian kinerja keuangan dengan target kinerja 100 %. Kedua target tersebut dapat terealisasi sebesar 99,6 %. Secara terperinci dijabarkan sebagai berikut :

**1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target capaian 100 % dan terealisasi sebesar 100 % karena setiap sub kegiatan dari kegiatan ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan tiga dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu satu dokumen Rencana Kerja, satu dokumen Rencana Strategis dan satu dokumen Standar Operasional Prosedur. Penyusunan ketiga dokumen tersebut terealisasi 100 %.
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan satu dokumen RKA-SKPD. Penyusunan dokumen tersebut terealisasi 100 %.
- c. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan satu dokumen RKA-SKPD perubahan. Penyusunan dokumen tersebut terealisasi 100 %.

- d. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan satu dokumen DPA-SKPD. Penyusunan dokumen tersebut terealisasi 100 %.
- e. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan satu dokumen DPA-SKPD perubahan. Penyusunan dokumen tersebut terealisasi 100 %.
- f. Sub kegiatan kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan satu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dapat terealisasi 100 %.

## 2) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan administrasi keuangan dan ketersediaan dokumen keuangan perangkat daerah dengan target capaian 100 % dan terealisasi sebesar 100 % karena setiap sub kegiatan dari kegiatan ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan indikator kinerja/output berupa sebanyak 42 orang pegawai yang bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia dapat menerima gaji dan tunjangan PNS, serta tambahan penghasilan pegawai (TPP) dalam kurun waktu 12 bulan di tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.

- b. Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan indikator kinerja/output berupa persentase pengelolaan administrasi perkantoran yang terselenggara dapat terealisasi 100 %.
- c. Sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 12 laporan keuangan/akuntansi SKPD dapat terealisasi 100 %.
- d. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 1 laporan keuangan akhir tahun SKPD dapat terealisasi 100 %.
- e. Sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 12 laporan realisasi fisik kegiatan (RFK) bulanan dapat terealisasi 100 %.

### 3) **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan target capaian 100 % dan terealisasi sebesar 100 % karena sub kegiatan dari kegiatan ini telah memenuhi target

yang telah ditetapkan. Kegiatan ini memiliki satu sub kegiatan yaitu penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 1 laporan hasil pengelolaan dan penataan barang milik daerah pada SKPD dapat terealisasi 100 %.

#### 4) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target capaian 100 % dan dapat terealisasi sebesar 97 % karena tidak semua sub kegiatan dari kegiatan ini dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan satu dokumen daftar urut kepangkatan (DUK) PNSD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 dapat terealisasi 100 %.
- b. Sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai dengan indikator kinerja/output berupa pengelolaan 3675 data kinerja ASN tahun 2022 dapat terealisasi 94 %, karena dari 3800 data yang menjadi target pada tahun 2022, 3454 data kinerja yang telah dikelola dan dilaporkan.

## 5) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah dengan target capaian 100 % dan dapat terealisasi sebesar 100 % karena setiap sub kegiatan dari kegiatan ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator kinerja/output berupa penyediaan instalasi dan pemasangan 62 unit bola lampu untuk penerangan kantor pada tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.
- b. Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 2 unit dengan indikator kinerja/output berupa tersedianya peralatan rumah tangga pada tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.
- c. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam waktu 12 bulan dengan indikator kinerja/output berupa tersedianya bahan cetak dan penggandaan pada tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.
- d. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja/output berupa penyediaan bahan bacaan dan peraturan

- perundang-undangan yang terdiri dari 4 media cetak dalam waktu 12 bulan pada tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.
- e. Sub kegiatan penyediaan bahan material/material dengan indikator kinerja/output berupa jumlah bahan/material yang tersedia waktu 12 bulan pada tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.
  - f. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja/output berupa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 4 media cetak dalam waktu 12 bulan pada tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.
  - g. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan indikator kinerja/output berupa terselenggaranya perjalanan dinas dalam kurun waktu 12 bulan pada tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.
  - h. Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyediaan arsip dan tata naskah kepegawaian yang disusun dalam satu dokumen dapat terealisasi 100 %.
  - i. Sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dengan indikator kinerja/output berupa terselenggaranya absensi online ASN

pada 3695 orang ASN pada tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.

**6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan target capaian 100 % dan dapat terealisasi sebesar 100 % dengan sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yaitu pengadaan aset tak berwujud dengan indikator kinerja/output berupa penyediaan 27 unit mebeleur kantor dapat terealisasi 100 %.

**7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target capaian 100 % dan dapat terealisasi sebesar 100 % karena setiap sub kegiatan dari kegiatan ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator kinerja/output berupa terlaksananya administrasi surat menyurat selama 12 bulan pada tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.

- b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik dengan indikator kinerja/output berupa terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam waktu 12 bulan pada tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.
- c. Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja/output berupa terpeliharanya 2 unit peralatan dan perlengkapan kantor pada tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.
- d. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan indikator kinerja/output berupa tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan pada tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.

**8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target capaian 100 % dan dapat terealisasi sebesar 94,5 % karena tidak semua sub kegiatan dari kegiatan ini dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas

operasional atau lapangan dengan indikator kinerja/output berupa 27 unit kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya pada tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 89 % atau 24 unit.

b. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan indikator kinerja/output berupa satu unit gedung perkantoran dalam kondisi baik yang terpelihara pada tahun 2021 dapat terealisasi 100 %.

#### **b) Program Kepegawaian Daerah**

Program Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan setiap kegiatan terdiri dari satu atau beberapa sub kegiatan. Indikator capaian dalam program ini ada dua yaitu persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah dengan target kinerja 100 % dan persentase pegawai berkinerja baik dengan target kinerja 100 %. Kedua target tersebut dapat terealisasi sebesar 91 %. Secara terperinci dijabarkan sebagai berikut :

##### **1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN dengan target capaian 100 % dan dapat terealisasi sebesar 88 % karena tidak semua sub kegiatan dari kegiatan ini dapat memenuhi

target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dengan indikator kinerja/output berupa 2000 formasi pengadaan ASN pada tahun 2022 dapat terealisasi 18,2 %. Hal ini terjadi karena dari 2000 formasi yang telah disusun dalam rangka pengadaan ASN, hanya dapat terpenuhi sebanyak 364 formasi.
- b. Sub kegiatan evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN dengan indikator kinerja/output berupa pemenuhan 364 orang ASN dan penyusunan 1 laporan hasil evaluasi pengadaan ASN dapat terealisasi sebesar 100 %.
- c. Sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK dengan indikator kinerja/output berupa pengurusan dan penerbitan Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU), Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Peserta Taspen (KPT), SK PNS dan SK CPNS. Dari seluruh indikator/output sub kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 88,3 %. Hal ini terjadi karena dari 200 kartu KARIS/KARSU yang ditargetkan, hanya terealisasi sebanyak 150 kartu atau dalam persentase sebesar 75 %. Kartu peserta taspen terealisasi sebesar 100 % yaitu hanya terpenuhi sebanyak 150 KPT sesuai dengan target.

Penerbitan SK CPNS dapat terealisasi 90 % yakni dari 91 SK yang ditargetkan hanya dapat terealisasi sebanyak 82 SK sesuai dengan jumlah peserta yang lulus seleksi CPNS. Namun pada tahun 2022, pengurusan dan penerbitan SK PNS tidak diterbitkan karena tidak adanya seleksi CPNS pada tahun 2020 dan Tidak ada penerbitan Kartu Pegawai telah diganti menjadi Kartu ASN Virtual.

- d. Sub kegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN dengan indikator kinerja/output berupa penyelenggaraan HUT KORPRI dapat terealisasi sebesar 100 %.
- e. Sub kegiatan pengelolaan sistem informasi kepegawaian dengan indikator kinerja/output berupa penyediaan 3675 data PNSD dalam Aplikasi SAPK dan dapat terealisasi sebesar 3695 data atau 100 %.
- f. Sub kegiatan pengelolaan data kepegawaian dengan indikator kinerja/output berupa persentase data pegawai dalam aplikasi SIMPEG yang terpelihara/terkelola adalah sebanyak 3675 data dan dapat terealisasi sebesar 3695 atau 100 %.
- g. Sub kegiatan evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan laporan evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian dan dapat terealisasi sebesar 100 %.

h. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dengan indikator kinerja/output berupa pelayanan administrasi pensiun bagi PNS yang memasuki masa pensiun. Pada tahun 2022 ditargetkan 100 orang yang memasuki masa pensiun dan dapat terealisasi sebesar 100 %. Secara keseluruhan, jumlah PNS yang pensiun pada tahun 2022 terdiri dari 138 orang yang terbagi menjadi 120 orang bagi yang memasuki masa pensiun (BUP), 14 orang yang pensiun karena meninggal dunia, dan 4 orang adalah yang pensiun atas permintaan sendiri.

## **2) Mutasi dan Promosi ASN**

Indikator kegiatan ini adalah persentase mutasi dan promosi ASN dengan target capaian 100 % dan dapat terealisasi sebesar 93,8 % karena setiap sub kegiatan dari kegiatan ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Sub kegiatan pengelolaan mutasi ASN dengan indikator kinerja/output berupa jumlah ASN yang dimutasi, rotasi dan promosi. Pada tahun 2022 terdapat 550 orang yang dimutasi, rotasi dan promosi yang terdiri dari 278 orang ASN yang dimutasi, 134 orang yang dirotasi dan 138 orang yang mendapat promosi. Oleh sebab itu, pada tahun 2022 sub kegiatan ini dapat terealisasi 81,4 % karena telah memenuhi

target kinerja yaitu sebanyak 550 orang dari 676 orang yang telah ditargetkan.

b. Sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN dengan indikator kinerja/output berupa terselenggaranya ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat. Pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 700 orang yang menerima SK Kenaikan Pangkat dan dapat terealisasi 100 %. Jumlah ASN yang mendapat SK Kenaikan Pangkat pada tahun 2022 adalah sebanyak 848 orang pada periode april dan oktober, dengan rincian sebagai berikut :

1. Periode April sebanyak 428 orang

2. Periode Oktober sebanyak 420 orang.

c. Sub kegiatan pengelolaan promosi ASN dengan indikator kinerja/output berupa terselenggaranya seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama. Pada tahun 2022, seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama diselenggarakan sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang dan dapat terealisasi 100 %.

### **3) Pengembangan Kompetensi ASN**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pengembangan kompetensi ASN dengan target capaian 100 % dan dapat terealisasi sebesar 87,8 % karena tidak semua sub kegiatan dari

kegiatan ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan peningkatan kapasitas kinerja ASN dengan indikator kinerja/output berupa jumlah ASN yang mendapatkan kenaikan gaji berkala (KGB). Pada tahun 2022, sebanyak 487 orang ASN yang mendapatkan kenaikan gaji berkala dan menerima SK KGB. Oleh sebab itu, sub kegiatan ini dapat dikatakan terealisasi 81,2 % karena hanya dapat terealisasi sebanyak 487 orang dari 600 orang yang menjadi target kinerja.
- b. Sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dengan indikator kinerja/output berupa persentase SK tugas belajar, surat izin belajar, dan surat keterangan peningkatan pendidikan yang diterbitkan dan jumlah ASN yang menerima bantuan tugas belajar dan penyelesaian pendidikan. Pada tahun 2022, ada 2 orang yang menerima bantuan tugas belajar dan 5 orang yang menerima izin belajar. Sub kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 70 % karena dari 10 orang yang ditargetkan menerima bantuan tugas belajar dan penyelesaian pendidikan, hanya dapat terpenuhi untuk 7 orang.
- c. Sub kegiatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat dengan indikator kinerja/output berupa terselenggaranya

pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/workshop PNS. Pada tahun 2022, sub kegiatan ini dapat terealisasi 100 %.

- d. Sub kegiatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional dengan indikator kinerja/output berupa jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis/fungsional dan bimtek khusus ASN. Pada tahun 2022 terdapat 40 orang ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis/fungsional dan bimtek khusus ASN. Dengan demikian, sub kegiatan ini pada tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 100 %.

#### **4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

Indikator kegiatan ini adalah persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan target capaian 100 % dan dapat terealisasi sebesar 95 % karena tidak semua sub kegiatan dari kegiatan ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur dengan indikator kinerja/output berupa jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Pada tahun 2022, terealisasi 100 % yaitu sebanyak 260 orang ASN yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang terdiri dari :

- 185 orang yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun;
  - 34 orang yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya XX Tahun;
  - 41 orang yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun.
- b. Sub kegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai dengan indikator kinerja/output berupa jumlah ASN yang berprestasi yang mendapatkan penghargaan. Pada tahun 2022, sub kegiatan ini terealisasi sebesar 75 % karena dari 8 orang yang menjadi target indikator sub kegiatan, namun hanya dapat terpenuhi sebanyak 6 orang, yaitu 3 orang yang mendapatkan penghargaan berprestasi dan 3 orang yang mendapatkan penghargaan pengabdian.
- c. Sub kegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan indikator kinerja/output berupa satu laporan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Pada tahun 2022, terealisasi sebanyak 100 % dengan tersedianya laporan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang terdiri dari 3695 orang.
- d. Sub kegiatan pengelolaan penyelesaian penyelenggaraan disiplin ASN dengan indikator kinerja/output berupa jumlah pelanggaran disiplin yang dikelola/ditindaklanjuti. Pada tahun

2022, dari 35 orang yang menjadi target indikator kinerja sub kegiatan, dapat terealisasi sebanyak 125 orang atau dengan persentase sebesar 100 %.

e. Sub kegiatan pembinaan disiplin ASN dengan indikator kinerja/output berupa jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin. Pada tahun 2022, dari 35 orang yang menjadi target indikator kinerja sub kegiatan, dapat terealisasi sebanyak 125 orang atau dengan persentase sebesar 100 %. 125 orang ASN yang mendapatkan sanksi pelanggaran disiplin terdiri dari :

- 123 (seratus dua puluh tiga) orang yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN;
- 2 (dua) orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi;

### **c) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Indikator capaian dalam program ini yaitu persentase cakupan ASN yang lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Sosio-Kultural dan Diklat Teknis yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang memuat 4 (empat) sub kegiatan dengan target kinerja 100 % dan dapat terealisasi sebesar 70,55 %. Secara terperinci dijabarkan sebagai berikut :

## 1) **Pengembangan Kompetensi Teknis**

Indikator kegiatan ini adalah penyusunan kebijakan teknis peningkatan kualitas SDM Aparatur berbasis tupoksi dengan target capaian 100 % dan dapat terealisasi sebesar 50 % karena satu sub kegiatan dari kegiatan ini tidak terlaksana. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum dengan indikator sub kegiatan yaitu terselenggaranya diklat teknis fungsional dan bimtek khusus dan ASN yang mengikuti diklat teknis fungsional dan bimtek khusus. Pada tahun 2022, jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis fungsional dan bimtek khusus sebanyak 96 orang dari 60 orang yang telah ditargetkan dengan pelaksanaan diklat teknis dan fungsional dan bimtek khusus sebanyak 1 kali sesuai target. Oleh sebab itu, sub kegiatan ini terealisasi 100 %.
- b. Sub kegiatan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan

pemerintahan umum dengan indikator sub kegiatan ini yaitu peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pendekatan ASN Corporate University tidak terlaksana karena terjadi pergeseran anggaran perubahan tahap kedua.

2) **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**

Indikator kegiatan ini adalah terselenggaranya pemetaan dan evaluasi kompetensi jabatan pengawas dengan target capaian 100 % dan dapat terealisasi sebesar 91,1 %.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Sub kegiatan penyusunan kebijakan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi pratama dengan indikator kinerja/output berupa terselenggaranya pemetaan dan evaluasi kompetensi jabatan administrator dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Pada tahun 2022, indikator sub kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 96,5 % yang terdiri dari :

- Pemetaan dan evaluasi kompetensi jabatan administrator dapat terealisasi sebanyak 93 % yaitu dari 141 orang peserta yang ditargetkan dapat terealisasi sebanyak 131 orang.

- Sebanyak 31 OPD yang mengikuti pemetaan dan evaluasi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) (teralisasi sebesar 100 %, dari 31 OPD yang ditargetkan.
- b. Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan dengan indikator kinerja/output berupa jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Pada tahun 2022, indikator sub kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 85,7 % yang terdiri dari :
- Sebanyak 2 orang yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) terealisasi 67 %;
  - Sebanyak 15 orang yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) terealisasi 100 %;
  - Sebanyak 82 orang yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS, terealisasi sebanyak 90 % dari target awal sesuai dengan jumlah peserta yang lulus seleksi CPNS dan bersyarat mengikuti Pelatihan Dasar CPNS ;

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur bila ditinjau dari segi kuantitatif dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Tenaga Kontrak/Honorer/PHL (Non PNS) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 dengan klasifikasi sebagai berikut :

**Tabel. 3.1 Sumber Daya Aparatur BKPSDM T.A 2022**

NO	PEGAWAI	PENDIDIKAN						JUMLAH	GOLONGAN								
		SMA	D.I	D.II	D.III	S.1	S.2		II	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	<b>PEMEGANG ESELON:</b> • Eselon II  • Eselon III  • Eselon IV • Jabatan Fungsional					1											1
	<b>Jumlah</b>				3	18	4		3	2		4	10	3			1
2.	<b>NON ESELON:</b> • Staf • Kontrak • Sukarela	8 12				9 3	13		10	4	4	1					
	<b>Jumlah</b>	20			3	22			10	4	4	1					
	<b>Total</b>	20			6	40	4		13	6	4	5	10	3			1

Ketersediaan Sumber Daya Aparatur ditinjau dari segi kuantitatif dalam Tahun Anggaran 2022 sudah dianggap memadai. Selanjutnya, ditinjau dari segi penggolongan PNSD dapat di kualifikasikan sebagai berikut :

**Tabel. 3.2 Penggolongan PNSD T.A 2022**

No.	Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Pria	10	234	869	344	1.457
2.	Wanita	0	292	1.584	461	2.337
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>526</b>	<b>2.453</b>	<b>805</b>	<b>3.794</b>

Kemudian ditinjau dari penggolongan PNSD berdasarkan tingkat pendidikan, dikualifikasikan sebagai berikut :

**Tabel. 3.3 Penggolongan PNSD dari Tingkat Pendidikan T.A 2022**

No.	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV/ S.1	S.2	S.3	
1.	Pria	0	9	302	5	38	70	967	64	2	1457
2.	Wanita	0	0	250	8	78	303	1633	63	1	2336
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>9</b>	<b>552</b>	<b>13</b>	<b>116</b>	<b>373</b>	<b>2600</b>	<b>127</b>	<b>3</b>	<b>3793</b>

Pengolahan data untuk tenaga PTT/PHL yang banyak membantu dalam kegiatan pelayanan pada instansi yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, mulai tahun 2021 tidak lagi ditangani oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Data tenaga PTT/PHL dikelola oleh masing-masing instansi/organisasi perangkat daerah yang ada di daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar sehingga mulai tahun 2021, tidak lagi dilampirkan data jumlah dan penggolongan tenaga PTT/PHL dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.

Berdasarkan data-data tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Sumber Daya Aparatur masih rendah karena pendidikan formal masih didominasi D.II dan SLTA ke bawah yang tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah baik itu dinas, badan dan kantor serta di kecamatan-kecamatan dan kelurahan, dimana 6 kecamatan terdapat di daratan serta 5 kecamatan di kepulauan.

Pengadaan, penyebaran, bimbingan kedisiplinan serta peningkatan kapasitas adalah merupakan tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan ukuran kinerja aparatur lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan roda organisasi.

### **C. REALISASI KEUANGAN**

Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalokasikan anggaran pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 7.675.060.000. Kemudian, terjadi perubahan anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sehingga anggaran yang dialokasikan untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi Rp. 6.809.027.200.

Sebagai bahan analisis akuntabilitas keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, jumlah anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

No.	Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)		Target (%)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keu (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.675.060.000</b>	<b>6.809.027.200</b>	<b>100 %</b>	<b>6.506.234.602</b>	<b>97,6 %</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	55.000.000	33.612.200	100 %	33.612.200	100 %
1.1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.000.000	16.625.000	100 %	16.625.000	100 %
1.1.b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	3.040.000	100 %	3.040.000	100 %
1.1.c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %
1.1.d	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.000.000	2.950.000	100 %	2.950.000	100 %
1.1.e	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.000.000	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %
1.1.c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	4.997.000	100 %	4.997.000	100 %

1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.839.011.200	3.305.317.000	100 %	3.274.572.985	99 %
1.2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.700.000.000	3.229.706.000	100 %	3.198.961.985	99 %
1.2.b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.011.200	46.261.000	100 %	46.261.000	100 %
1.2.c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.000.000	12.950.000	100 %	12.950.000	100 %
1.2.d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %
1.2.e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	21.000.000	13.400.000	100 %	13.400.000	100 %
1.3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	16.000.000	11.109.000	100 %	7.509.000	68 %
1.3.a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.000.000	11.109.000	100 %	7.509.000	68 %
1.4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	67.807.000	19.768.000	100 %	19.768.000	100 %
1.4.a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	27.807.000	16.029.000	100 %	16.029.000	100 %
1.4.b	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	3.739.000	100 %	3.739.000	100 %
1.5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	463.761.000	494.558.000	100 %	488.468.071	99 %
1.5.a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %
1.5.b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.965.000	9.710.000	100 %	9.710.000	100 %
1.5.c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %
1.5.d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.720.000	14.720.000	100 %	10.870.000	74 %
1.5.e	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	31.450.000	100 %	29.770.000	95 %
1.5.f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	300.096.000	352.678.000	100 %	352.675.871	99,9 %

	Konsultasi SKPD					
1.5.g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.000.000	16.000.000	100 %	15.650.200	98 %
1.5.h	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.000.000	40.000.000	100 %	39.792.000	99 %
1.6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>32.450.000</i>	<i>50.000.000</i>	<i>100 %</i>	<i>50.000.000</i>	<i>100 %</i>
1.6.a	Pengadaan Mebel	32.450.000	0	100 %	50.000.000	100 %
1.6.b	Pengadaan Aset tak Berwujud	0	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %
1.7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>92.915.000</i>	<i>117.154.200</i>	<i>100 %</i>	<i>107.018.828</i>	<i>91 %</i>
1.7.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.000.000	20.082.000	100 %	16.482.000	82 %
1.7.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.915.000	82.775.000	100 %	76.456.628	92 %
1.7.c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	10.150.000	100 %	10.149.000	99,9 %
1.7.d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	4.147.200	100 %	3.931.200	95 %
1.8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>109.831.000</i>	<i>153.461.000</i>	<i>100 %</i>	<i>148.928.125</i>	<i>97 %</i>
1.8.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.880.000	103.510.000	100 %	98.977.125	96 %
1.8.b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.951.000	49.951.000	100 %	49.951.000	100 %
2.	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>1.490.490.800</b>	<b>1.180.868.000</b>	<b>100 %</b>	<b>641.127.678</b>	<b>54 %</b>
2.1	<i>Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN</i>	<i>319.000.000</i>	<i>384.878.000</i>	<i>100 %</i>	<i>365.061.947</i>	<i>95 %</i>

2.1.a	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	30.000.000	16.490.000	100 %	16.167.200	98 %
2.1.b	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	15.000.000	15.000.000	100 %	11.640.000	78 %
2.1.c	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	65.000.000	240.262.000	100 %	227.374.067	95 %
2.1.d	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	45.000.000	19.338.000	100 %	18.990.400	98 %
2.1.e	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	45.000.000	25.258.000	100 %	24.800.000	98 %
2.1.f	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000	19.736.000	100 %	19.005.200	96 %
2.1.g	Pengelolaan Data Kepegawaian	44.000.000	31.832.000	100 %	30.181.600	95 %
2.1.h	Evaluasi Data, Informasi, dan Sistem Informasi Kepegawaian	25.000.000	16.962.000	100 %	16.903.480	99,6 %
2.2	<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>	<i>327.254.000</i>	<i>395.128.000</i>	<i>100 %</i>	<i>389.278.100</i>	<i>99 %</i>
2.2.a	Pengelolaan Mutasi ASN	100.000.000	58.466.000	100 %	57.549.100	98 %
2.2.b	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	127.254.000	106.479.000	100 %	101.679.000	95 %
2.2.c	Pengelolaan Promosi ASN	100.000.000	230.183.000	100 %	230.050.000	99,9 %
2.3	<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>	<i>671.000.000</i>	<i>275.780.600</i>	<i>100 %</i>	<i>271.211.914</i>	<i>98 %</i>
2.3.a	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	100.000.000	137.886.000	100 %	133.719.200	97 %
2.3.b	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	21.000.000	13.236.600	100 %	13.236.200	99,9 %
2.3.c	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	150.000.000	114.658.000	100 %	114.656.114	99,9 %
2.3.d	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	400.000.000	10.000.000	100 %	9.600.000	96 %
2.4	<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	<i>173.236.800</i>	<i>125.081.400</i>	<i>100 %</i>	<i>121.882.800</i>	<i>97 %</i>

2.4.a	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	17.236.800	13.587.000	100 %	13.308.600	98 %
2.4.b	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	40.000.000	38.275.900	100 %	38.205.800	99, 8 %
2.4.c	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	66.000.000	31.270.800	100 %	30.070.700	96 %
2.4.d	Pembinaan Disiplin ASN	25.000.000	20.884.700	100 %	20.494.700	98 %
2.4.e	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25000000	21.063.000	100 %	19.803.000	94 %
<b>3.</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>1.453.794.000</b>	<b>1.443.180.000</b>	<b>100 %</b>	<b>1.231.922.832</b>	<b>85 %</b>
3.1	<i>Pengembangan Kompetensi Teknis</i>	166.000.000	249.850.000	100 %	74.532.428	<b>30 %</b>
3.1.a	<i>Penyelenggaraan Pengembangan Kometensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum</i>	0	246.000.000	100 %	74.532.428	30 %
3.1.b	<i>Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang</i>	116.000.000	3.850.000	100 %	0	100 %

	<i>dan Urusan Pemerintahan Umum</i>					
3.2.	<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	1.287.794.000	1.193.330.000	100 %	1.157.390.404	97 %
3.2.a	<i>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>	1.287.794.000	1.193.330.000	100 %	1.157.390.404	97 %

**a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.184.979.200,- dan terealisasi sebesar 4.129.877.009 atau 99 %. Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan setiap kegiatan terdiri dari satu atau beberapa sub kegiatan. Secara terperinci dijabarkan sebagai berikut :

**1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran Rp. 33.612.000,-

dan terealisasi sebesar Rp. 33.612.000,- atau 100 %. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan tiga dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu satu dokumen Rencana Kerja, satu dokumen Rencana Strategis dan satu dokumen Standar Operasional Prosedur. Alokasi anggaran untuk sub. Kegiatan ini adalah Rp. 16.625.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.625.000,- atau 100 %;
- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan satu dokumen RKA-SKPD. Alokasi anggaran untuk sub. Kegiatan ini adalah Rp. 3.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.040.000,- atau 100 %;
- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan satu dokumen Perubahan RKA-SKPD. Alokasi anggaran untuk sub. Kegiatan ini adalah Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100 %;
- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen dpa-SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan satu dokumen DPA-SKPD. Alokasi anggaran untuk sub.

Kegiatan ini adalah Rp. 2.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.950.000,- atau 100 %;

- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan satu dokumen DPA-SKPD. Alokasi anggaran untuk sub. Kegiatan ini adalah Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100 %;
- Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan satu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Alokasi anggaran untuk sub. Kegiatan ini adalah Rp. 4.997.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.997.000,- atau 100 %;

## **2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan administrasi keuangan dan ketersediaan dokumen keuangan perangkat daerah dengan alokasi anggaran Rp. 3.305.317.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.274.572.631.985,- atau 99 %.

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan indikator kinerja/output berupa sebanyak 42 orang pegawai yang bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat menerima gaji dan tunjangan PNS, serta tambahan penghasilan pegawai (TPP) dalam

- kurun waktu 12 bulan di tahun 2022. Alokasi anggaran sub. Kegiatan ini adalah Rp. 3.229.706.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 3.198.961.985 atau 99 %;
- Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan indikator kinerja/output berupa persentase pengelolaan administrasi perkantoran yang terselenggara. Alokasi anggaran sub. Kegiatan ini adalah Rp. 248.331.400,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 235.468.600,- atau 94,8 %;
  - Sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 12 laporan keuangan/akuntansi SKPD. Alokasi anggaran sub. Kegiatan ini adalah Rp. 12.950.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 12.950.000,- atau 100 %;
  - Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 1 laporan keuangan akhir tahun SKPD. Alokasi anggaran sub. Kegiatan ini adalah Rp. 3.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar 3.000.000,- atau 100 %;
  - Sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 12 laporan realisasi fisik kegiatan (RFK) bulanan. Alokasi anggaran sub. Kegiatan ini adalah

Rp. 13.400.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 13.400.000,- atau 100 %.

**3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Kegiatan ini memiliki satu sub kegiatan yaitu penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan 1 laporan hasil pengelolaan dan penataan barang milik daerah pada SKPD. Alokasi anggaran Kegiatan ini adalah Rp. 11.109.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 7.509.000,- atau 68 %.

**4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.768.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.768.000,- atau 100 %. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan satu dokumen daftar urut kepangkatan (DUK) PNSD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. Alokasi anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 16.029.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 16.029.000,- atau 100 %;

- Sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai dengan indikator kinerja/output berupa pengelolaan 3615 data kinerja ASN tahun 2022. Alokasi anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 3.739.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.3.739.000 atau 100 %.

#### 5) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah dengan alokasi anggaran Rp. 494.558.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 488.468.739,- atau 99 %. Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator kinerja/output berupa penyediaan instalasi dan pemasangan 62 unit bola lampu untuk penerangan kantor pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 %;
- Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 2 unit dengan indikator kinerja/output berupa tersedianya peralatan rumah tangga pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp.9.710.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.710.000,- atau 100 %;

- Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam waktu 12 bulan dengan indikator kinerja/output berupa tersedianya bahan cetak dan penggandaan pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100 %;
- Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja/output berupa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 4 media cetak dalam waktu 12 bulan pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 14.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.870.000,- atau 74 %;
- Sub kegiatan penyediaan bahan/material dengan indikator kinerja/output berupa jumlah bahan/material yang tersedia waktu 12 bulan pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 31.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.770.000,- atau 95 %;
- Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja/output berupa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 4 media cetak dalam waktu 12 bulan pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran

Rp. 14.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.870.000,- atau 74 %;

- Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan indikator kinerja/output berupa terselenggaranya perjalanan dinas dalam kurun waktu 12 bulan pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 352.678.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 352.675.871,- atau 99,9 %;
- Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dengan indikator kinerja/output berupa penyediaan arsip dan tata naskah kepegawaian yang disusun dalam satu dokumen dengan alokasi anggaran Rp. 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.650.200,- atau 98 %;
- Sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dengan indikator kinerja/output berupa terselenggaranya absensi online ASN pada 3695 orang ASN pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.792.000,- atau 99 %.

**6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100 %. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu pengadaan Aset tak Berwujud.

#### **7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan dengan alokasi anggaran Rp. 117.154.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 107.018.828,- atau 91 %. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator kinerja/output berupa terlaksananya administrasi surat menyurat selama 12 bulan pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 20.082.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.482.000,- atau 82 %;
- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik dengan indikator kinerja/output berupa terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam waktu 12 bulan pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 82.775.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 76.456.628,- atau 92 %;
- Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja/output berupa terpeliharanya

2 unit peralatan dan perlengkapan kantor pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 10.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.149.000,- atau 99,9 %;

- Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan indikator kinerja/output berupa tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 4.147.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.931.200,- atau 95 %.

#### **8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi anggaran Rp. 153.461.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 148.428.125,- atau 97 %. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator kinerja/output berupa 26 unit kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 103.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.977.125,- atau 96 %;

- Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan indikator kinerja/output berupa satu unit gedung perkantoran dalam kondisi baik yang terpelihara pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran Rp. 49.951.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.951.000,- atau 100 %;

#### **b) Program Kepegawaian Daerah**

Program Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan setiap kegiatan terdiri dari satu atau beberapa sub kegiatan. Indikator capaian dalam program ini ada dua yaitu persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah dan persentase pegawai berkinerja baik. Alokasi anggaran pada Program Kepegawaian Daerah adalah sebesar Rp. 1.180.868.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 641.127.678,- atau 54 %. Secara terperinci dijabarkan sebagai berikut :

##### **1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN dengan alokasi anggaran Rp. 384.878.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 365.061.947,- atau 95 %. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dengan indikator kinerja/output berupa 2000 formasi pengadaan ASN pada

tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 16.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.167.200,- atau 98 %;

- Sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK dengan indikator kinerja/output berupa pengurusan dan penerbitan Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU), Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Peserta Taspen (KPT), SK PNS dan SK CPNS dengan alokasi anggaran Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.640.200,- atau 78 %;
- Sub kegiatan evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN dengan indikator kinerja/output berupa pemenuhan 364 orang ASN dan penyusunan 1 laporan hasil evaluasi pengadaan ASN dengan alokasi anggaran Rp. 240.262.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 227.374.067,- atau 95 %;
- Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dengan indikator kinerja/output berupa pelayanan administrasi pensiun bagi PNS yang memasuki masa pensiun. Pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 19.338.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.990.400,- atau 98 %;
- Sub kegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN dengan indikator kinerja/output berupa penyelenggaraan HUT KORPRI dengan alokasi anggaran Rp. 25.258.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.800.000,- atau 98 %;

- Sub kegiatan pengelolaan sistem informasi kepegawaian dengan indikator kinerja/output berupa penyediaan 3695 data PNSD dalam Aplikasi SAPK dan dengan alokasi anggaran Rp. 19.736.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.005.200,- atau 96 %;
- Sub kegiatan pengelolaan data kepegawaian dengan indikator kinerja/output berupa persentase data pegawai dalam aplikasi SIMPEG yang terpelihara/terkelola adalah sebanyak 3695 data dan dengan alokasi anggaran Rp. 31.832.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.181.600,- atau 95 %;
- Sub kegiatan evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian dengan indikator kinerja/output berupa penyusunan laporan evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 16.962.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.903.480,- atau 99,6 %.

## **2) Mutasi dan Promosi ASN**

Indikator kegiatan ini adalah persentase mutasi dan promosi ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 395.128.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 389.278.100,- atau 99 %.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan pengelolaan mutasi ASN dengan indikator kinerja/output berupa jumlah ASN yang dimutasi, rotasi dan

promosi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.466.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.549.100,- atau 98 %;

- Sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN dengan indikator kinerja/output berupa terselenggaranya ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.479.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 101.679.000,- atau 95 %;
- Sub kegiatan pengelolaan promosi ASN dengan indikator kinerja/output berupa terselenggaranya seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.183.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 230.050.000,- atau 99,9 %.

### **3) Pengembangan Kompetensi ASN**

Indikator kegiatan ini adalah persentase pengembangan kompetensi ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.275.780.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 271.211.914,- atau 98 %. Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan peningkatan kapasitas kinerja ASN dengan indikator kinerja/output berupa jumlah ASN yang mendapatkan kenaikan gaji berkala (KGB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.236.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.236.600,- atau 100 %;

- Sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dengan indikator kinerja/output berupa persentase SK tugas belajar, surat izin belajar, dan surat keterangan peningkatan pendidikan yang diterbitkan dan jumlah ASN yang menerima bantuan tugas belajar dan penyelesaian pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.137.886.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 133.719.200,- atau 97 %;
- Sub kegiatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat dengan indikator kinerja/output berupa terselenggaranya pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/workshop PNS. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 114.658.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.656.114,- atau 99,9 %;
- Sub kegiatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional dengan indikator kinerja/output berupa jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis/fungsional dan bimtek khusus ASN. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.600.000,- atau 96 % ;

#### **4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

Indikator kegiatan ini adalah persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.081.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 121.882.800,- atau 97 %. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan indikator kinerja/output berupa satu laporan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Pada tahun 2022, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.587.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.308.600,- atau 98 %;
- Sub kegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai dengan indikator kinerja/output berupa jumlah ASN yang berprestasi yang mendapatkan penghargaan. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.38.275.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.205.800,- atau 99,8 %;
- Sub kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur dengan indikator kinerja/output berupa jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Pada tahun 2022, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.270.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.070.700,- atau 96 %;
- Sub kegiatan pembinaan disiplin ASN dengan indikator kinerja/output berupa jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin. Pada tahun 2022, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.884.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.494.700,- atau 98 %;

- Sub kegiatan pengelolaan penyelesaian penyelenggaraan disiplin ASN dengan indikator kinerja/output berupa jumlah pelanggaran disiplin yang dikelola/ditindaklanjuti. Pada tahun 2022, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.063.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.803.000,- atau 94 %.

### **c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Indikator capaian dalam program ini yaitu persentase cakupan ASN yang lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Sosio-Kultural dan Diklat Teknis yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang memuat 4 (empat) sub kegiatan dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.443.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.231.922.832,- atau 85 %. Secara terperinci dijabarkan sebagai berikut :

#### **1) Pengembangan Kompetensi Teknis**

Indikator kegiatan ini adalah penyusunan kebijakan teknis peningkatan kualitas SDM Aparatur berbasis tupoksi dengan target capaian 100 %. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 249.850.000 dan terealisasi sebesar Rp. 74.532.428 atau 29%. Secara rinci, sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

- Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat

daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum dengan indikator sub kegiatan yaitu terselenggaranya diklat teknis fungsional dan bimtek khusus dan ASN yang mengikuti diklat teknis fungsional dan bimtek khusus. Pada tahun 2022 alokasi anggaran sub. Kegiatan ini sebesar Rp. 246.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 74.532.428 atau 30 %;

- Sub kegiatan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum dengan indikator sub kegiatan ini yaitu peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pendekatan ASN Corporate University dengan alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.850.000,- namun tidak terlaksana karena terjadi pergeseran anggaran perubahan tahap kedua.

## **2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**

Indikator kegiatan ini adalah terselenggaranya pemetaan dan evaluasi kompetensi jabatan pengawas dengan target capaian 100 % dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.193.330.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.157.390.404,- atau 97 %. Sub kegiatan ini yaitu:

- Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan dengan indikator kinerja/output berupa jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.193.330.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.157.390.404,- atau 97 %.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Laporan ini menyajikan informasi kinerja berupa hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil . Adapun dasar penyusunan Laporan ini yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga laporan ini memberikan arti bagi optimalisasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan di masa yang akan datang.

Benteng, 04 Februari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



**PATTA AMIR, SP**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**NIP. 19641127 198711 1 003**

# LAMPIRAN